



Hasil Audit BPK RI

Kubu Raya Masuk Predikat WDP

Borneo Tribune, Kubu Raya

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terkait pengelolaan keuangan daerah serta program-program pembangunan. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

"Untuk hasil audit BPK Kabupaten Kubu Raya, masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Jadi tinggal satu tahapan lagi kita mencapai wajar tanpa pengecualian (WTP)," kata Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya, Selasa (17/6).

Menurutnya, untuk mencapai wajar tanpa pengecualian merupakan impian besar bagi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalbar ini. "Oleh karena itu dengan opini tersebut tentu kami memang harus bekerja keras untuk dapat memperbaiki serta melakukan perubahan agar kedepan tidak

WDP lagi," tuturnya.

Saat diisnggung mengenai apa saja yang menjadi penilaian BPK, Hermanus menerangkan, dalam hal ini BPK menilai banyak hal dan temuan-temuan terkait persoalan keuangan daerah. "Dan paling terpenting lagi dan menjadi sorot BPK itu persoalan aset. Dimana kita pemerintah diminta sesegera mungkin memperbaiki persoalan aset itu," cetusnya.

Dia pun berharap, dengan adanya hasil audit ini, pihaknya dapat melakukan pembenahan-pembenahan secara global. Sehingga pada penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten kubu raya tidak lagi mendapatkan penilaian opini wajar dengan pengecualian (WDP).

"Harapan kita yang kedepan bisa lebih baik lagi. Dan pada saat audit BPK nantinya kita mendapatkan predikat WTP," katanya.

Kata dia, berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

yang sudah disampaikan oleh BPK pada tanggal 2 Juni 2014 lalu. Pemerintah langsung melaksanakan rapat gabungan pada tanggal 6 Juni 2014 lalu. "Rapat koordinasi yang kita lakukan guna menindaklanjuti hasil audit BPK. Dimana hal itu penting diketahui oleh seluruh SKPD di Kubu Raya agar kedepan laporan keuangan daerah kita jauh lebih baik lagi," katanya.

"Hasil yang disampaikan oleh BPK dengan predikat WDP itu sangat penting kita bahas dan duduk bersama SKPD yang ada di Kubu Raya," ungkapnya.

Selain itu, Hermanus pun meminta kepada seluruh PNS. Yang ada dibadan pemerintahan kabupaten kubu raya serta masyarakat dan LSM untuk melaporkan kepada BPK, jika ditemukan adanya penyelewengan -penyelewengan keuangan negara ataupun program-program pemerintah kabupaten yang tidak tepat pada dasarnya. (Adex)